

Top Nasional: Beda Pendapat PDIP dan Gerindra soal Duet Prabowo-Ganjar, Laporan Transaksi Janggal Rafael Alun Sempat Mangkrak di KPK

TEMPO.CO, Jakarta -Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya wacana mengusung duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 menuai silang pendapat PDIP dan Partai Gerindra. Kemudian, PPATK menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan laporan transaksi janggal pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, ke penegak hukum sejak 2012. Berikut ringkasannya:

1. Silang Pendapat PDIP dan Gerindra Soal Duet Prabowo - Ganjar

Wacana mengusung duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 menuai silang pendapat di antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra. PDIP mensyaratkan calon presiden yang diusung harus berasal dari partainya. Sementara, Gerindra juga mensyaratkan Prabowo harus menjadi calon presiden (capres). PDIP: Capres harus berasal dari PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi wacana Partai Gerindra untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dia membuka peluang kerjasama kedua partai, namun dengan syarat capres yang akan mereka usung harus berasal dari PDIP. "Ya penawaran kerja sama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan (PDIP)," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Maret 2023. Ia mengingatkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan dalam HUT partai ke-50 pada Januari lalu bahwa capres berasal dari kader internal PDIP. Hasto mengatakan PDIP sudah melakukan proses kaderisasi secara sistemik dan memberikan penugasan kepada kader di berbagai tingkatan dalam perspektif yang ideal. "Partai mengusung calon presiden dari kader internal partai, itulah yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan," kata dia. Hasto pun menyatakan bahwa partainya tidak dalam posisi menerima ataupun menolak opsi duet tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa masalah capres dan cawapres menunggu keputusan dari Megawati Soekarnoputri. "Ya nanti Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan pasangan yang terbaik dan sesuai dengan yang menjadi harapan rakyat," kata Hasto. Dia pun menyatakan proses

pengusungan pasangan capres dan cawapres oleh PDIP pada Pemilu 2024 tak akan jauh berbeda dari dua Pemilu sebelumnya."Jadi, kalau kami lihat secara empiris pada tahun 2014 dan 2019, maka tahapannya, Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan calon presiden dari internal PDIP, pada saat itu adalah Bapak Jokowi," kata dia. Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan partainya terbuka untuk menggaet Ganjar Pranowo untuk mendampingi Prabowo. Akan tetapi, Hashim menyatakan syarat Prabowo harus menjadi capres. Dia menampik kemungkinan Prabowo menjadi cawapres dengan alasan kakaknya itu jauh lebih senior dari Ganjar, terpaut 15 tahun. Senioritas itu, menurut Hashim merupakan jaminan pengalaman yang lebih matang. Saya kira kami terbuka kalau Pak Ganjar mau diduetkan dengan Pak Prabowo, kata Hashim, seperti dikutip dari Tempo, Ahad, 12 Maret 2023. Gerindra saat ini telah menjalin koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara PDIP masih belum menentukan dengan siapa mereka akan bekerja sama untuk menghadapi Pilpres 2024. PKB di sisi lain telah menyorongkan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, sebagai pendamping Prabowo Subianto. Mereka bahkan sempat memberikan ultimatum agar penentuan capres-cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya harus dilakukan sebelum Ramadhan mendatang. Di PDIP, Ganjar Pranowo juga belum pasti mendapat dukungan. Dia masih harus bersaing dengan Ketua DPR, Puan Maharani, yang merupakan putri dari Megawati. Karena itu, sejumlah kalangan menilai wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan sulit terwujud. Wacana mengusung duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo muncul setelah keduanya mendampingi Presiden Jokowi dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Mereka pun sempat berswafoto bersama para petani saat itu. Kehadiran ketiga tokoh itu menghembuskan wacana duet Prabowo- Ganjar karena Jokowi kerap memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo dan Ganjar untuk maju pada Pilpres 2024.

2. Alasan Pelaporan Transaksi Janggal Rafael Alun Sempat Mangkrak di KPK

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sempat menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan laporan transaksi janggal pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, ke penegak hukum sejak 2012. Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Praswad Nugraha mengakui hal itu. Praswad

menyatakan KPK memang pernah mendapatkan laporan transaksi janggal Rafael saat dia masih bertugas di lembaga itu. Praswad merupakan satu dari 57 pegawai KPK yang menjadi korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 2021. Selanjutnya: KPK terima ribuan laporan transaksi janggal. Saat itu, menurut Praswad, KPK bahkan menerima ribuan laporan transaksi janggal, tidak hanya Rafael. Hal itu membuat para penyelidik dan penyidik harus membuat prioritas untuk menelusurinya. Posisi Rafael yang belum menjadi pejabat dengan posisi yang tinggi, menurut dia, membuat laporannya tidak menjadi prioritas. "Sehingga KPK dulu juga bingung mau yang mana dulu yang ditanganin, mengingat posisi jabatan dan eselon Rafael Alun, pastinya bukan jadi prioritas," ujar Praswad melalui pesan tertulis, Senin, 13 Maret 2023. Mengungkap transaksi janggal tidak rumit. Menurut dia, untuk mengungkap kasus seperti ini tak terlalu rumit. Hanya saja, jumlah laporan yang mencapai ribuan membuat KPK kewalahan. "Kasus ini tidak rumit, cuma laporan transaksi janggal itu sudah terlalu banyak. Ribuan kasus," ujar Ketua lembaga IM57+ tersebut. Nama Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah kasus penganiayaan yang dilakukan putranya, Mario Dandy Satriyo, terhadap seorang remaja berusia 17 tahun di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Mario disebut kerap memamerkan harta kekayaan orang tuanya berupa mobil Jeep Rubicon dan motor gede Harley Davidson. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK, Rafael mengaku memiliki harta sejumlah Rp 56,7 miliar. Nilai itu dianggap janggal oleh KPK karena posisi Rafael yang hanya sebagai pejabat Eselon III di Kementerian Keuangan. PPATK pun mengeluarkan laporan hasil analisa (LHA) transaksi janggal Rafael yang nilai mutasinya mencapai Rp 500 miliar. Rafael diduga melakukan pencucian uang dengan modus menggunakan banyak nama dalam transaksi keuangan. Selain itu, PPATK menyebut adanya jaringan pencuci uang profesional di belakang Rafael. Safe deposit box Rafael diblokir. Terbaru, PPATK dan KPK membekukan safe deposit box milik Rafael di sebuah bank. Dalam kotak penyimpanan itu, Rafael disebut menyimpan uang sebesar Rp 37 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Uang itu tak dilaporkan Rafael dalam LHKPN miliknya. Kasus Rafael Alun ini lantas membuat berbagai pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi sorotan. Mereka diantaranya adalah Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Kantor Andhi

Pramono, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro. Ketiganya juga disebut memiliki harta kekayaan tidak wajar. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, juga mengungkapkan adanya transaksi janggal senilai Rp 300 triliun yang dilakukan para pegawai Kementerian Keuangan dari rentang waktu 2009-2022. Nilai itu, tidak termasuk transaksi janggal Rafael Alun. Pilihan Editor: 3 Fakta Terkini Wahono Saputro, Kolega Rafael Alun yang Diperiksa KPK